

SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Isabella¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang
Jl. Jend. Sudirman No.629 KM.4,5 Palembang Kode Pos : 30129
Email : isabella@uigm.ac.id¹⁾

ABSTRAK

In the community, nation and state, today is experiencing with the times. Indonesia as a country with a vast territory and a population has also changed significantly in many sectors. These changes will certainly bring influence on the dynamic state of this country with regard to ductility, and toughness needed to develop strength and ability to address all threats, challenges and interference both from within and outside. This condition is called national resilience. Therefore, we need a strategy that is appropriate for the current condition so that national resilience of Indonesia can be implemented, protected and maintained. The strategy is also important to produce strength and care for the interest of Indonesia. The number of cases of abuse against symbols of the state, the lack of knowledge of younger generation towards the concept of nationalism are two examples of this nation's problems. One of the efforts made by the House of Representatives in the MPR, DPR and DPRD in cultivating national security is through socialization of national insight. The socialization of national insight would make a positive contribution to the national resilience of Indonesia. The success of this socialization can be seen from the efforts that have been made so far.

Key words: national resilience, socialization of national insight, students

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara dengan wilayah yang luas 5.193.250 km², dan dengan jumlah penduduk 260 juta lebih Indonesia merupakan bangsa yang besar. Dengan kondisi geografis negara kepulauan terdapat 17.504 pulau. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh pada kondisi dinamis bangsa yang berkaitan dengan keuletan, dan ketangguhan guna mengembangkan kekuatan dan kemampuan secara nasional dalam rangka mengatasi segala ancaman, tantangan, gangguan, baik dari dalam maupun dari luar yang dikenal dengan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ancaman, tantangan ketahanan nasional saat ini mulai bermunculan melalui berbagai bentuk. Seperti dampak negative globalisasi dan modernisasi.

Sebuah studi jajak pendapat tentang generasi muda dan berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan oleh harian *Kompas*, menunjukkan hasil semangat persatuan semakin melemah (56,8%) dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok (77%) dibandingkan kepentingan bangsa

(21,2%) kendati masih suka menjadi bagian negara Indonesia (50,9%). Selanjutnya yang berhubungan dengan revitalisasi wawasan kebangsaan, berdasarkan hasil survey BPS RI tentang Survei kehidupan Bernegara (SKB) yang dilaksanakan tahun 2011, dengan hasil 43,4% kepercayaan dan harapan masyarakat begitu besar agar tenaga pendidik (guru dan dosen) untuk memberikan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membekali generasi muda, dalam hal ini siswa sekolah menengah atas, untuk tetap mempertahankan rasa cinta tanah air dan bangsa, memupuk rasa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Diantaranya seperti sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang telah dilakukan oleh senator-senator melalui DPR RI, dan DPD RI ketika masa reses. Itulah perlu usaha lebih lanjut dalam melestarikan rasa nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, agar apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kemerdekaan tetap terjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

A. Dasar Hukum Ketahanan Nasional

Dasar hukum ketahanan nasional terdiri dari:

- a) Landasan Idiil: Pancasila, terkait dengan pembelaan terhadap negara, Pancasila khususnya sila ketiga yang mewajibkan setiap warganegara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan baik dalam arti ideology, ekonomi, social budaya, memiliki nilai patriotism, menjunjung tinggi tradisi kejuangan, dan kerelaan untuk berkorban dalam membela bangsa dan Negara.
- b) Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa setiap warga

Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan Negara.

- c) Landasan Operasional: landasan operasional usaha pembelaan Negara, antara lain sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi dan berisi keuletan dan ketangguhan, yang didalamnya mengandung kekuatan nasional untuk menghadapi mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, dan sekaligus untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Prayitno dan Trubus, 2013) .

Secara empiris, pernyataan tersebut dapat dijelaskan unsur-unsurnya sebagai berikut: (1) Ketangguhan kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya; (2) Keuletan adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan; (3) Identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau Negara dilihat secara keseluruhan (hostik). Negara dipandang sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, dengan penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya; (4) Integritas, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsure sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional; (5) Ancaman adalah upaya yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan dan usaha yang dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis; (6) Tantangan, yaitu upaya yang bersifat menggugah kemampuan. Biasanya ini terjadi karena suatu kondisi yang memaksa, sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok merasa harus berbuat sesuatu untuk menghadapi segala tantangan; (7) Hambatan adalah usaha dari diri sendiri Gangguan adalah upaya yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konseptual.

Menurut Prayitno (2003: 256) Konsepsi ketahanan Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan Negara secara utuh dan menyeluruh terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Secara konseptual ada tiga “wajah” yang digambarkan dalam koteks ketahanan nasional, yaitu: a) Ketahanan Nasional sebagai suatu kenyataan atau riil; 2) Ketahanan Nasional

sebagai konsepsi; c) Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir atau metode pendekatan.

Seperti yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional, sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integritas dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan Negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan social budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.

B. Asas –asas Ketahanan Nasional

Asas-asas ketahanan nasional terdiri dari:

- a) Asas Kesejahteraan dan Keamanan, asas ini kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu, kelompok maupun masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, unsure kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya Ketahanan Nasional;
- b) Asas Komprehenship integral/menyeluruh terpadu, artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi dan seimbang;
- c) Asas Mawas diri ke dalam dan keluar. Dalam hal ini mawas diri ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional yang berdasarkan nilai nilai ke mandirian bangsa. Sedangkan mawas diri ke luar dilakukan dalam rangka mengantisipasi strategis luar negeri;
- d) Asas Kekeluargaan. Asas ini berisi sikap-sikap hidup yang dijiwai keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari asas kekeluargaan ini tetap mengakui adanya perbedaan, namun nilai-nilai keharmonisan sangat diutamakan.

C. Sifat Ketahanan Nasional

Beberapa sifat Ketahanan nasional dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Mandiri, artinya percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama yang dilandasi oleh sifat kemandirian;
- b) Dinamis, artinya tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan Negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan ke masa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik;
- c) Wibawa, artinya keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional yang berlanjut dan berkesinambungan, tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Arah yang ingin dicapai adalah agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya;
- d) Konsultasi dan Kerjasama, artinya adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Hubungan keduanya perlu dilaksanakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing.

D. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasarkan oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigm pembangunan nasional. Sedangkan fungsi dari ketahanan nasional adalah:

Pertama, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional. Hal ini perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersifat inter-regional (wilayah), inter-sektoral maupun multidisiplin.

Kedua, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya, sebagai pola dasar pembangunan nasional. Fungsi ini merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilakukan sesuai rancangan program.

Ketiga, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Metode tersebut merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan Negara yang dikenal sebagai astagatra (delapan aspek) yang terdiri atas aspek alamiah (geografi, kekayaan alam dan penduduk, pertahanan dan keamanan).

E. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Menurut Soerjono Soekanto (2007) sosialisasi adalah proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota. Sedangkan menurut Robert M.Z. lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai dan peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan social. Selanjutnya menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara dalam kehidupan masyarakat (way

of life in society) untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.

Menurut Bruce J. Cohen dalam Soerjono Soekanto (2007) sosialisasi memiliki beberapa tujuan yaitu: (1) Sosialisasi bertujuan agar tiap individu mendapatkan bekal keterampilan yang kelak nantinya akan dia butuhkan untuk tetap hidup; (2) Sosialisasi bertujuan agar setiap individu dapat berkomunikasi yang tentu saja dengan efektif sehingga kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dapat berkembang; (3) Sosialisasi bertujuan agar mengendalikan fungsi fungsi organik melalui latihan latihan mawas diri yang tepat; (4) Sosialisasi bertujuan sehingga setiap individu dapat membiasakan dirinya dengan nilai nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat; (5) Membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, yaitu bagaimana ia memberikan reaksi terhadap suatu pengalaman menuju proses pendewasaan.

Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang atau sudut pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan eksternal (Suhadi dan Sinaga, 2006). Menurut prof. Muladi, pengertian wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hakikat wawasan kebangsaan dapat diartikan cara pandang menyeluruh seseorang atau kelompok dalam mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Nilai dasar wawasan kebangsaan terwujud dalam enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yang terdiri dari: (1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; (2) Cinta tanah air dan bangsa; (3) Demokrasi atau kedaulatan rakyat; 4) Tekat bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu; (5) Masyarakat adil dan makmur; dan (6) Kesetiakawanan social.

Makna wawasan kebangsaan dapat diwujudkan melalui hal-hal sebagai berikut: (1) Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan; (2) Wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat pada patriotism yang licik; (3) Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga azas Bhineka Tunggal Ika dipertahankan; 4) NKRI yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju; 5) Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis

jalan dalam menjalankan misi ditengah-tengah tata kehidupan dunia.

2. Pembahasan

Ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan merupakan dua konsep besar dalam upaya menangkal berbagai pengaruh dan dampak negative dari perkembangan kemajuan teknologi, lingkungan, yang disertai dengan berubahnya persepsi dan hakikat ancaman terhadap eksistensi maupun kedaulatan bangsa. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang telah memberikan dampak peperangan modern dalam bentuk Proxy War.

Semangat kebangsaan dan wawasan kebangsaan yang merupakan motivasi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa. Agar terhindar dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Berbagai cara telah dilakukan untuk tetap menjaga ketahanan nasional dewasa ini. Melalui sosialisasi wawasan kebangsaan seperti yang telah diagendakan oleh MPR RI melalui anggota-anggota DPR RI dan DPD RI. Berbagai konsep baru sosialisasi pun telah menjadi perhatian tersendiri bagi lembaga-lembaga terkait yang terus memperjuangkan untuk tetap terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan.

Untuk sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh anggota DPD RI misalnya, setiap masa reses, dalam satu tahun ada agenda empat kali untuk melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan. Sosialisasi ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah, kampus-kampus ataupun kelompok-kelompok masyarakat, yang memegang peran penting dalam menerima materi-materi wawasan kebangsaan. Dalam sosialisasi wawasan kebangsaan yang di selenggarakan oleh DPD RI biasanya mengundang pakar, atau pembicara yang kompeten dibidangnya. Selain itu kepada peserta sosialisasi diberikan buku paket dari MPR RI berupa Panduan Pemasayarakatan UUD NRI 1945, materi bahan tayang Pancasila Sebagai Dasar Negara, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika dan Tap MPR. Bahan tayang yang dibuat oleh tim sekretariat MPR RI dibuat sedemikian rupa menyesuaikan dengan kondisi kekinian, menggunakan media proyektor dengan tayangan power point. Hal ini tentunya berbeda ketika masa Orde Baru, penyampaian materi wawasan kebangsaan melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) melalui lembaga BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila). Walaupun metode ceramah tetap masih dipertahankan, namun dikombinasi dengan kemajuan teknologi. Sehingga materi ini dapat diterima oleh generasi sekarang. Dengan harapan melalui sosialisasi kelompok-kelompok tersebut dapat melanjutkan kembali, ataupun menginformasikan kembali kepada anggota masyarakat lainnya tentang pentingnya

wawasan kebangsaan dalam upaya menjaga ketahanan nasional.

Hal lain yang diupayakan pemerintah dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017, tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang diketuai oleh Yudi Latief. Salah satu agenda program UKP PIP yang berkaitan dengan penguatan ketahanan nasional adalah pengembalian mata pelajar Pancasila yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dalam program kerjanya UKP PIP ditugaskan untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang terintegrasi dengan program-program kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dalam pasal 3 Perpres Nomor 54 tahun 2017 dinyatakan bahwa tugas UKP PIP membantu presiden merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideology Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideology Pancasila, secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sedangkan pasal 5 menyatakan susunan organisasi UKP PIP terdiri atas: Pengarah terdiri atas unsur: (1) Tokoh Kenegaraan; (2) Tokoh Agama dan Masyarakat; (3) Tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi. Sedangkan untuk unsur pelaksana terdiri atas : (1) Kepala; (2) Deputi Bidang Pengkajian Materi (3) Deputi Bidang Advokasi (Antara, 2017).

Program lainnya yang diupayakan oleh UKP PIP sebagai langkah menghidupkan kembali gelora Pancasila sebagai dasar Negara, dengan diluncurkannya program Penguatan Pendidikan Pancasila bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, melalui pendekatan interaktif dan partisipatif, dan nonton bareng film Pantja Sila: Cita-cita dan Realita.

Sebagai upaya mempertahankan ketahanan nasional, lembaga lainnya seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI Sebagai lembaga Negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia telah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional.

Dalam pelaksanaan upaya penguatan ketahanan nasional, yang salah satunya sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah, saat ini membutuhkan media-media yang sesuai dengan kondisi kekinian. Misalnya siswa-siswa di sekolah sekarang lebih tertarik dengan media visualisasi, baik melalui proyektor atau pun tayangan film-film documenter perjuangan kemerdekaan bangsa, video yang bermuatan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jika memungkinkan siswa pun dapat diajak berpartisipasi dalam pembuatan film-film yang mereka perankan sendiri, sesuai dengan ide-ide kreatif mereka yang berhubungan dengan penguatan ketahanan nasional.

Bagi lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dan kampus-kampus dapat memberikan materi Pancasila dan Kewarganegaraan melalui kunjungan studi

ketempat-tempat bersejarah ataupun tempat-tempat yang dapat memberikan muatan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, seperti museum, instansi ataupun dinas-dinas terkait yang bertugas menjaga ketahanan nasional seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Kesimpulan

Ketahanan nasional Indonesia telah teruji mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau terpecah belahnya NKRI. Bukti ketahanan nasional setidaknya terlihat dari cara bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunis tahun 1965. Selain itu Indonesia telah melalui krisis ekonomi dan politik tahun 1997-1998.

Namun ketahanan nasional akan terus menghadapi dinamika perubahan perkembangan zaman. Berbagai konsep upaya mempertahankan ketahanan nasional melalui wawasan kebangsaan telah dilakukan. Mulai dari lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah, sekolah-sekolah, kampus dan lembaga swadaya masyarakat, terus harus bersinergi, berkoordinasi dan melakukan kajian guna tetap terjaganya NKRI. Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi dampak negative globalisasi dan modernisasi ataupun proxy war. Mengingat ancaman gangguan ketahanan nasional akan semakin berkembang dan bervariasi sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi yang semakin terbuka.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa Pertahanan Negara Indonesia bersifat semesta dengan menetapkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Termasuk sosialisasi wawasan kebangsaan yang diselenggarakan berbagai pihak mulai dari MPR RI, DPD RI, DPR RI, hingga lembaga-lembaga yang kompeten dibidangnya sebagai penyelenggara upaya mempertahankan ketahanan nasional.

Daftar Pustaka

- Alie, Marzuki. (2016). Makalah *Peran Alumni Nusantara dalam Mempertahankan Jati Diri Bangsa*.5-6
- Antara. (2017). *Inilah Tugas dan Struktur UKP Pembinaan Ideologi Pancasila*. Accessed on Oktober 10. 2017 from <http://kabar24.bisnis.com/read/20170607/15/660122/inilah-tugas-dan-struktur-ukp-pembinaan-ideologi-pancasila>
- Dirjend Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila*

untuk Perguruan Tinggi.

- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lehmanas RI 2012 Nasional Kompas Accessed on October 10 2017 <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/17494671/senang.kebangsaan.langkah.nyata.pemerintah.a.mat.dinanti>
- Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2015 tentang Kementrian Pertahanan.
- Prayitno and Trubus.2003. *Pendidikan KADEHAM Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Rahman, Arief. 2017. Meningkatnya Nilai-Nilai Kebangsaan dapat memperkokoh NKRI. Accessed on Onctober 3 2017 from <https://pusatamalpancasila.wordpress.com/2012/08/07/meningkatnya-nilai-nilai-wawasan-kebangsaan-dapat-memperkokoh-keutuhan-nkri-3/>
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Republika. 2016. Accessed on October 3 2017 from <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/01/07/o0kjc51-wawasan-kebangsaan-kita>
- Sekjend MPR RI. 2014. *Panduan Pemasarakatan UUD NRI 1945, TAP MPR RI*.
- Soekanto, Soerjono.2007. *Sosilogi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Astri. 2016. Makalah Dasar Hukum Ketahanan Nasional. *STEKOM Welari*, Kendal Jawa Tengah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.